

SKRIPSI
KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGUATAN EKONOMI
LOKAL DI KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

MUHAMAD IKSAN

17520062

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGUTAN EKONOMI LOKAL
DI KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN
BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

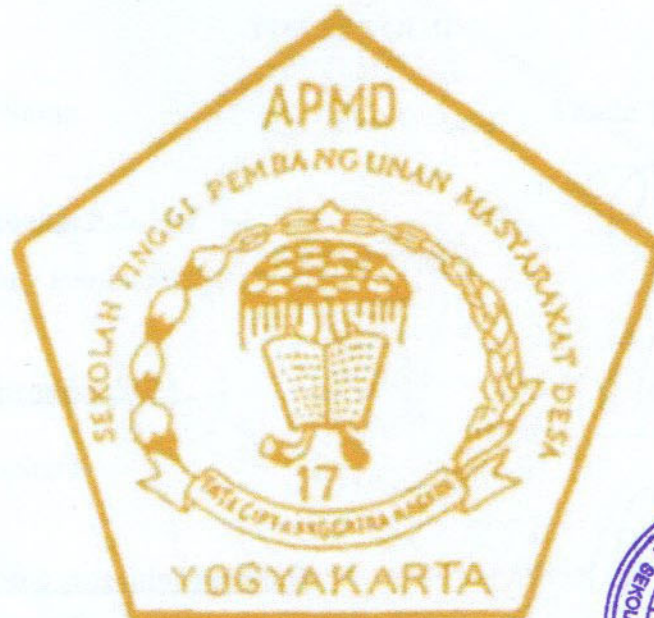
SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



Disusun Oleh :

MUHAMAD IKSAN

17520062



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :




Hari : Rabu

Tanggal : 1 Februari 2023

Jam : 14:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Utami Sulistiana, S.P.,M.P</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Ir. Nelly Tiurmida, MPA.</u> Penguji Samping I	
<u>Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

 Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Iksan

Nim : 17520062

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Penguatan Ekonomi Lokal Di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhamad Iksan

17520062

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kepada Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat melaksanakan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi persyaratan sarjana S-1 melalui skripsi yang bertitel: Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Penguatan Ekonomi Lokal Di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tak ada gading yang tak retak. Begitulah pepatah bijak. Penyusun juga menyadari, bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana skripsi S-1 yang telah teruji sebelumnya, karena keterbatasan penyusun dalam memahami teori ilmu pengetahuan dan aplikasinya di lapangan penelitian ilmiah. Penyusun sangat berterima kasih atas setiap masukan, kritikan sekaligus dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sotoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Utami Sulistiana, S.P, M..P selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak/Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
5. Bapak H. Mulyana selaku Lurah di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karena telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi

Semoga segala bantuan serta dukungan ilmu yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan dan berkar dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon saran dan kritik yang membangun sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Muhamad Iksan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Pemerintah Desa.....	10
2. Kapasitas Pemerintah Desa	14
3. Penguatan Ekonomi Lokal	17
a. Definisi Penguatan Ekonomi Lokal	17
b. Pendekatan Penguatan Ekonomi Lokal	18
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22
a. Konsep BUMDes	22

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	29
F. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Unit Analisis.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data	34
4. Teknik Analisis Data	36
BAB II PROFIL KALURAHAN SRIMARTAN	38
A. Sejarah Kalurahan Srimartani	38
B. Letak Geografis dan Administratif Kalurahan Srimartani	38
1. Batas Wilayah	38
2. Luas Wilayah.....	39
3. Keadaan Topografi	40
C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	42
1. Jumlah Penduduk	42
2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	42
3. Tingkat Pendidikan	42
4. Pekerjaan	44
5. Potensi Sumber Daya Alam (SDA).....	44
6. Potensi Lainnya yang Ada di Kelurahan Srimartani	45
D. Kondisi Sarana dan Prasarana	46
E. Pemerintahan Kalurahan	48
1. Pemerintahan Kalurahan Srimartani	48

2. Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Srimartani	49
F. Keuangan Kalurahan Srimartani.....	50
1. Pendapatan Kalurahan Srimartani	50
2. Belanja Kegiatan Kalurahan.....	51
G. BUMDes Kalurahan Srimartani.....	52
1. Sejarah BUMDes Srimartani Makmur	52
2. Visi dan Misi BUMDes Srimartani Makmur	52
BAB III KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGUATAN	
EKONOMI LOKAL DI KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON	
PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWAH	
YOGYAKARTA.....	
53	
A. Deskripsi Informan	53
B. Analisis Data	54
1. Bentuk penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul	55
2. Kapasitas pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul	65
3. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul	75
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77

B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1.Luas wilayah yang diperuntukan	39
Tabel 2. 2.Jumlah Padukuhan, Rukun Tetangga (RT), dan Luas Wilayah	41
Tabel 2. 3.Jumlah Penduduk	42
Tabel 2. 4.Tingkat Pendidikan Kalurahan Srimartan.....	43
Tabel 2. 5.Pekerjaan Masyarakat Kalurahan Srimartani.....	44
Tabel 2. 6.Pemerintahan Kalurahan Srimartani Periode 2018-2024	48
Tabel 2. 7.Pendapatan Kalurahan Srimartani.....	50
Tabel 2. 8.Belanja Kegiatan Kalurahan	51
Tabel 3.1. Deskripsi Informan	53
Tabel 3.2. Belanja Kegiatan Kalurahan Khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1. Kegiatan sekolah perempuan yang bekerjasama dengan UNY	62
Gambar 3.2. Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Ekonomi Produktif.....	64
Gambar 3.3. Pelatihan ekonomi produktif	67
Gambar 3.4. Srimartani Expo (Srimex) 2022	68

INTISARI

Salah satu skala prioritas yang dilakukan bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup pengembangan ekonomi lokal. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Kalurahan Srimartani merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang telah mendirikan BUMDes sebagai lembaga usaha desa dengan nama BUMDes Srimartani Makmur. Akan tetapi, hal ini tidak mudah mengingat pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis ekonomi dan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penguatan Ekonomi Lokal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah: Lurah/Kades, Perangkat Desa, Pengurus BUMDes, Kepala Dukuh, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani secara umum sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah desa setempat untuk memberikan fasilitas seperti menganggarkan biaya untuk menyelenggarakan pelatihan bagi 17 kelompok tani di wilayah tersebut serta adanya kenaikan PAD. PAD yang didapat dari BUMDes mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 PAD yang dihasilkan dari pasar desa sebesar Rp. 27.500.000 dan ditahun 2022 naik menjadi Rp. 35.000.000 atau naik sebesar 27,27%. Pemerintah Kalurahan Srimartani juga tengah menyusun regulasi terkait peraturan kalurahan tentang tata ruang untuk mengoptimalkan aset desa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor pendukung pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani adalah keinginan masyarakat, anggaran desa, serta dukungan dari lembaga-lembaga yang ada seperti BUMDes, kelompok tani, Gapoktani, KWT, dan lembaga usaha lainnya. Faktor yang menghambat pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini adalah kondisi ekonomi nasional yang kurang stabil pasca pandemi Covid-19.

Kata kunci: Kapasitas, Pemerintah Desa, Penguatan, Ekonomi Lokal.

ABSTRACT

One of the priority scales carried out for rural-based regional development includes the development of the local economy. The priority scale is expected to be able to stimulate and move the wheels of the economy in rural areas with the establishment of Village-Owned Enterprises. Kalurahan Srimartani is one of the villages in Bantul Regency that has established a Village-Owned Enterprise as a village business institution under the name BUMDes Srimartani Makmur. However, this is not easy considering that the Covid-19 pandemic has caused an economic crisis and caused a decrease in people's purchasing power. Based on these problems, researchers are interested in studying more deeply about the Capacity of Village Governments in Strengthening the Local Economy in Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Bantul Regency.

This research was a qualitative descriptive research. The informants in this study were: Lurah/Kades, Village Apparatus, BUMDes Management, Head of Hamlet, and the community. Data collection techniques include observation, documentation and interviews. Data analysis in this study uses qualitative descriptive data analysis techniques.

The results of the study show that the capacity of the village government in strengthening the local economy in the Srimartani Village is generally quite adequate. This can be seen from the commitment of the local village government to provide facilities such as budgeting costs to organize training for 17 farmer groups in the area as well as an increase in local revenue. Regional original income obtained from village-owned enterprises has increased where in 2021 regional original income generated from the village market is Rp. 27,500,000 and in 2022 it has increased to Rp. 35,000,000 or an increase of 27.27%. The Srimartani Village Government is also in the process of drafting regulations related to Village Regulations regarding spatial planning to optimize village assets. The results of the study also show that the supporting factors for the village government in strengthening the local economy in the Srimartani Village are the will of the community, the village budget, and support from existing institutions such as Village-Owned Enterprises, farmer groups, Gapoktani (combined farmer groups), KWT (groups women farmers), and other business institutions. The factor that hindered the village government in strengthening the local economy in this region was the unstable national economic conditions after the Covid-19 pandemic.

Keywords: Capacity, Village Government, Strengthening, Local Economy.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai proses untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di dalam suatu negara, baik untuk negara itu sendiri maupun negara lain. Meningkatkan tingkat kemandirian seseorang harus menjadi fokus dari setiap dan semua upaya pembangunan, terutama yang difokuskan pada daerah pedesaan. Oleh karena itu, penekanan upaya pembangunan harus diarahkan terutama pada daerah pedesaan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk harus dianggap sebagai tujuan utama dari setiap program pembangunan nasional. Karena sebagian besar kegiatan ekonomi negara diluncurkan dari satu lokasi ini, desa berperan sebagai pusat saraf utama bagi perluasan sektor komersial negara. Dalam konteks ini, Irdam dan Saad (2006) mengatakan bahwa salah satu tanda bahwa inisiatif pembangunan yang dilakukan pemerintah telah berhasil adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin. Mereka mengatakan bahwa hal ini dikarenakan tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil dan merata bagi semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, memastikan adanya distribusi manfaat yang adil merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa daerah pedesaan dapat berkembang dengan baik. Mengembangkan basis ekonomi yang kuat di berbagai lokasi, terutama di daerah pedesaan, adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui hasil yang memuaskan sebagaimana

diinginkan bersama, namun tingkat keberhasilannya belum secara optimal tercapai. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang optimal dalam membangun kemandirian desa.

Tindakan yang akan dilakukan oleh semua instrumen organisasi, yang berisi program-program untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, menurut Sumpeno (2011) disebut sebagai strategi pembangunan desa. Berikut ini adalah beberapa taktik yang sering digunakan untuk meningkatkan kemandirian desa:

1. Meningkatkan kemampuan penduduk lokal dan kelompok masyarakat sipil di desa-desa yang penting dan aktif.
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah dan keterlibatan aktif organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Menciptakan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang responsif dan inklusif bagi masyarakat.
4. Menciptakan lembaga ekonomi lokal yang otonom dan efektif.

Namun, secara realistis, masih banyak daerah pedesaan yang belum dikembangkan, sehingga kondisinya semakin memburuk. Sebenarnya, pemerintah telah mengambil berbagai tindakan untuk mengatasi masalah keterbelakangan pedesaan, termasuk sejumlah inisiatif yang berbeda dan

meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pedesaan setiap tahun untuk mengurangi jumlah desa yang masih tertinggal. Oleh karena itu, ke depannya pengaturan desa idealnya dapat dilakukan guna mengatasi hal tersebut.

Peraturan desa bertujuan, antara lain, untuk mendukung inisiatif, gerakan, dan keterlibatan masyarakat desa dalam pengembangan potensi dan aset desa untuk kepentingan bersama, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menutup kesenjangan pembangunan di seluruh negeri. Di sisi lain, di dunia saat ini, hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat hidup sesuai dengan potensi mereka. Hal ini disebabkan oleh status desa yang selama ini masih menjadi target pembangunan, sehingga desa sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat. Alasannya bisa dilihat pada kalimat berikut ini: Banyaknya peluang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena struktur pembangunan yang sentralistik di masa lalu dan rendahnya inovasi yang ada di antara sumber daya manusia di desa. Saat ini adalah saat yang tepat untuk pengembangan kota yang memanfaatkan potensi yang sudah ada.

Atas dasar anggapan ini, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi yang menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi lokal seharusnya membuat pemerintah pusat memberikan perhatian yang signifikan terhadap keberadaan desa. Tahun 2015 menandai tahun pertama berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bangsa dan negara Indonesia sedang berupaya mewujudkan pemberdayaan melalui kemandirian desa. Untuk memaksimalkan

potensi desa yang mandiri, diperlukan sebuah rencana pembangunan. Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia, setiap desa di Indonesia kini memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mengembangkan setiap potensi yang mereka miliki secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini dimungkinkan oleh undang-undang tersebut.

Pengelolaan desa melalui pemerintahan desa agar menjadi desa yang lebih maju, dan sejahtera masyarakatnya tersebut merupakan impian dari semua pemerintah desa yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengamanatkan kepada pemerintah yang berkuasa untuk “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Artinya masyarakat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya dan pemerintah bebas untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang sesuai dengan amanat UUD 1945.

Untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat perlu mendapatkan peran dari pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin, khususnya dengan mengembangkan perekonomian masyarakatnya. Hal ini dikarenakan peran pembangunan ekonomi merupakan dasar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maupun bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan deklarasi yang disampaikan oleh salah satu tokoh kunci, Rahardjo (2018), yang menyatakan bahwa tujuan mendasar dari pembangunan daerah yang komprehensif adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat tingkat pertumbuhan di setiap daerah menjadi lebih adil, 2)

membuat tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih adil di setiap daerah, dan 3) membuat perekonomian menjadi lebih kuat. Ekonomi desa adalah cara tradisional masyarakat untuk menghasilkan uang. Pandangan ini mengatakan bahwa tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan menyebarkan pertumbuhan ekonomi secara adil. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah desa sendiri dapat memastikan bahwa kekayaan masyarakat dibagi secara adil. Hal ini juga diharapkan dapat membantu pembangunan di daerah tertinggal.

Paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada wilayah perkotaan telah direvisi oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menjadi berbasis pada desa. Dalam hal ini, KPDT memprioritaskan pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pembangunan sarana dan prasarana pembangunan daerah berbasis pedesaan. Dengan dibentuknya lembaga ekonomi desa seperti BUMDes, maka skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan perekonomian di pedesaan (Badan Usaha Milik Desa).

Salah satu entitas ekonomi lokal yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes harus dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan sebagai salah satu inisiatif utama dalam membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan kreatif. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menuntut penerapan perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning), dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sebelumnya telah menetapkan BUMDes sebagai kerangka dasar otonomi daerah. BUMDes harus berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya karena merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berbasis di pedesaan. Hal ini dilakukan dengan harapan kehadiran dan efektivitas BUMDes mampu memberikan perubahan besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun tugas dan peran pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dan bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan diatur secara bersama-sama untuk mencapai tujuan utama lembaga yaitu pemberdayaan masyarakat dan mencegah agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dibeli oleh pihak-pihak tertentu (pemilik modal besar).

BUMDes Srimartani Makmur adalah nama yang diberikan kepada dusun Srimartani di Kabupaten Bantul yang membentuk BUMDes sebagai lembaga

bisnis lokal. BUMDes ini berdiri sejak tanggal 28 November 2016 dan termasuk salah satu BUMDes yang mapan diantara BUMDes-BUMDes lain yang ada di Kabupaten Bantul. Enam (6) jenis usaha yang berbeda dikelola oleh BUMDes Srimartani Makmur, antara lain: pengelolaan pasar desa, etalase produk UMKM yang dipasarkan melalui gerai-gerai desa, jasa pelayanan (E-Warung, PPOB), pengelolaan sampah terpadu 3R, laboratorium petani hortikultura modern, dan pengelolaan air bersih. Tujuh orang karyawan yang terdiri dari tiga orang manajer dan empat orang karyawan yang bekerja di bidangnya masing-masing, mendukung jenis-jenis usaha tersebut.

Meskipun mengintegrasikan BUMDes ke dalam masyarakat desa bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi. Tidak diragukan lagi, BUMDes masih belum sepenuhnya dipercaya di beberapa desa. Terlepas dari kenyataan bahwa BUMDes hadir untuk mendukung perekonomian desa, beberapa orang percaya bahwa bisnis mereka mungkin berada dalam bahaya karena keberadaannya. Dalam rangka untuk secara bersama-sama memajukan perekonomian di masyarakat, BUMDes Srimartani Makmur bekerja sama dengan penduduk Desa Srimartani. BUMDes Srimartani mendorong anggota masyarakat desa, terutama yang terlibat dalam kegiatan UMKM, untuk mengiklankan barang-barang mereka di toko Desa, yang baru saja dibentuk pada 1 Maret 2018. Upaya ini didukung oleh pemerintah desa, yang terlihat dari pemberian hak guna bangunan yang ditempatkan di dekat balai desa. BUMDes Srimartani memiliki kewenangan langsung atas salah satu

unit usaha perdagangan yang dimiliki BUMDes. Unit ini dikenal dengan nama Gerai Desa, yang juga berfungsi sebagai kantor BUMDes.

Warga dusun memiliki kesempatan untuk menyebarkan berita tentang barang dagangan mereka melalui berbagai sumber ini. Para pelaku UMKM tidak lagi terhambat oleh masalah pemasaran, salah satunya karena tidak memiliki showroom sendiri karena tidak perlu lagi pusing mencari lokasi untuk memajang dan menjual barang dagangannya. Hal ini dikarenakan mereka tidak perlu lagi pusing mencari lokasi untuk memajang dan menjual barang-barang mereka. Saat ini, BUMDes Srimartani Makmur telah bekerja sama dengan setidaknya dua puluh UMKM yang berbeda. Sama seperti kebanyakan toko lainnya, BUMDes Srimartani menentukan margin untuk setiap barang yang dijual yang masih dalam batas yang diperbolehkan. Tujuan utama dari outlet desa adalah untuk menghidupkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk UMKM di Desa Srimartani. Produk-produk yang dipasarkan beragam mulai dari produk kerajinan seperti batik dan rajut, produk makanan olahan kemasan seperti kripik pisang, produk bumbu instan siap pakai, sampai produk herbal seperti jamu instan dan minuman herbal, serta beberapa produk lainnya. Kegiatan tersebut diharapkan memang dapat mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal di wilayah tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak mudah mengingat pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis ekonomi dan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Saat ini persaingan usaha juga semakin sulit mengingat menjamurnya penjualan online selama pandemi Covid-19. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penguatan

Ekonomi Lokal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Penelitian memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui kapasitas pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat:

Pendalaman pemahaman tentang kapasitas pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan,

Kabupaten Bantul dan partisipasi masyarakat Kalurahan Srimartani dalam proses penguatan ekonomi lokal melalui BUMDes.

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat:
 - a. Bagi pengurus BUMDes, dapat mengetahui penguatan ekonomi lokal Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
 - b. Bagi masyarakat, dapat mengetahui peran BUMDes dalam kegiatan ekonominya.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan untuk bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu ekonomi, sosial, dan politik.

E. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Desa

Desa adalah sekumpulan orang yang dipersatukan oleh adat istiadat dan hukum adat, hidup dalam batas-batas wilayah yang telah ditentukan, memiliki ikatan lahir dan ikatan batin yang kuat karena seumuran, memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang sama, memiliki susunan pengurus yang dipilih secara bersama-sama, memiliki sejumlah harta kekayaan, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Nurcholis, 2011, h. 4).

Desa atau dengan nama aslinya, yang merupakan tingkatan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli, merupakan "badan hukum"

dan juga merupakan "Badan Pemerintahan", serta merupakan bagian dari kecamatan atau wilayah yang melingkupinya (Nurcholis, 2011, h. 4).

Sebuah tempat dengan batas-batas tertentu yang dihuni oleh sekelompok besar orang yang dikenal sebagai komunitas dan memiliki kesatuan serta adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bekerja sama disebut sebagai desa. Mayoritas penduduk setempat mengandalkan pekerjaan mereka sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Desa dihuni oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, politik, sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga menjadi kesatuan masyarakat yang sah berdasarkan adat istiadat, yang mengakibatkan adanya pertalian lahir batin antara warga masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: "Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Hak desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan wilayahnya secara tegas ditetapkan dalam pengertian desa.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional. Sehingga Desa memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam pasal 23 dan pasal 24. Pasal 23 menyebutkan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, sedangkan Pasal 24 menyebutkan bahwa penyelenggaran Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang pemerintahan desa sebagai berikut: “ Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa Kepala Desa juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, membangun desa dan masyarakat desa, dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada masyarakat desa (Pasal 26 Ayat 1). Pasal 34 ayat 1 mengatakan bahwa masyarakat desa memilih kepala desa secara langsung, dan seluruh warga desa memberikan suara pada saat yang bersamaan (Pasal 31 ayat 1). Setiap Daerah Kabupaten/Kota dapat memiliki kebijakan yang berbeda dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dihitung sejak tanggal pelantikan (Pasal 39 Ayat 1). Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Kepala Desa dapat menduduki jabatannya paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan, dapat dilakukan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Pasal 39 Ayat 2).

Kepala Desa memiliki wewenang, hak, dan tanggung jawab yang terkait dengan jabatannya dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan desa. Hal ini tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 2: Kepala Desa bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta membina dan meningkatkan perekonomian desa; memajukan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, dan memanfaatkan teknologi tepat guna; koordinasi pembangunan desa secara partisipatif, penunjukan kuasa hukum untuk mewakili desa di pengadilan apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dan melaksanakan hak-hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa salah satu wewenang kepala desa adalah pengelolaan keuangan desa. Dalam menjalankan wewenang tersebut, maka kepala desa harus memperhatikan regulasi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 1 disebutkan bahwa Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. Lebih lanjut, dalam pasal 4 disebutkan bahwa Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Dana Desa Kab/Kota = Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi Formula kab/kota.

2. Kapasitas Pemerintah Desa

Pertama, kemampuan dan kinerja desa dalam pemetaan sosial dan perencanaan pembangunan desa, menurut Eko Sutoro (2014), merupakan dua fokus utama terkait kapasitas desa. Kemampuan dan kinerja desa dalam mengelola dan mendistribusikan dana desa untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan lokal memberikan gambaran tentang kemampuan dan efektivitas pemerintahan desa. RPJMDes dan RKPDes pada dasarnya adalah dokumen hukum yang tidak memiliki nilai nyata pada tahap awal. Fungsi

utamanya adalah untuk memenuhi persyaratan kabupaten untuk penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD). Dialog desa, pemetaan desa, sensus, eksplorasi, pengorganisasian aset, musyawarah syukur, perencanaan, dan penganggaran merupakan beberapa dari sekian banyak tahapan dan agenda yang dilalui secara bersama-sama dan inklusif selama proses perencanaan desa. Prosedur ini memakan waktu yang jauh lebih lama daripada musrenbang yang hanya setengah hari. Tahap awal perjalanan ini menunjukkan bahwa desa (pemerintah dan masyarakat desa) mampu memetakan potensi, sumber daya, dan kemiskinan dengan menggunakan analisis kemiskinan partisipatoris dan alat pemetaan desa.

Agar sebuah desa dapat menjadi mandiri di masa depan, penting untuk memetakan dan menuliskan masalah yang dihadapi dengan cermat. Ada sumber daya untuk melakukan monitoring-evaluasi (monev), sebuah proses check and balance yang dapat dilakukan oleh semua anggota masyarakat, terutama dengan menggunakan pemetaan masalah yang komprehensif, dan kesempatan untuk menawarkan solusi berdasarkan peringkat dan prioritas berdasarkan potensi yang dimiliki desa, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan, dan kemitraan. Setelah kapasitas untuk merencanakan, muncullah kapasitas untuk mengalokasikan dana desa (APBDes). ADD adalah faktor utama dalam pengembangan APBDes. Meskipun jumlahnya terlihat kecil, ADD memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. ADD menyediakan dana untuk berbagai

kebutuhan masyarakat desa, seperti posyandu, lumbung pangan, infrastruktur, air bersih, dan kebutuhan lainnya.

IRE (2005, dikutip dalam Sani et al., 2018, hlm. 106) mengatakan bahwa ada banyak jenis pengembangan kapasitas yang perlu dilakukan untuk pemerintah desa.

- a. Kemampuan pemerintah desa untuk mengatur kehidupan desa dan komponen-komponennya (luas wilayah, kekayaan, dan jumlah penduduk) melalui peraturan desa yang didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat dikenal dengan istilah *regulatory capacity* (mengatur).
- b. Kemampuan untuk mengumpulkan, menggunakan, dan memaksimalkan aset yang dimiliki oleh desa, seperti aset fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan, dan aset politik, dikenal sebagai kapasitas ekstraksi (*extraction capacity*). Kapasitas pemimpin untuk mempertemukan berbagai pihak, termasuk BPD dan lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, dan warga desa juga termasuk kapasitas ekstraksi.
- c. Kemampuan distributif pemerintah desa adalah kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya secara adil dan merata sesuai dengan prioritas utama masyarakat desa.
- d. Kemampuan responsif, atau kemampuan untuk peka atau tanggap terhadap kebutuhan atau keinginan anggota masyarakat, menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan pembangunan desa.
- e. Kemampuan pemerintah desa untuk membangun jaringan kerja sama dengan pihak luar dalam rangka meningkatkan kapasitas ekstraksi dikenal sebagai kapasitas jaringan dan kerja sama.

Dengan kemampuan terbaik yang dimiliki pemerintah desa, kelima kualitas ini harus dikembangkan secara konsisten, baik secara personal maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan berbagai penguatan tersebut. Pemerintah desa akan lebih mampu menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya jika kapasitasnya diperkuat baik secara teoritis maupun praktis.

3. Penguatan Ekonomi Lokal

a. Definisi Penguatan Ekonomi Lokal

Tujuan utama dari setiap proyek pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis pekerjaan yang tersedia di daerah tersebut. Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan melihat dan membangun potensi daerah. Hal ini dilakukan melalui pembangunan ekonomi lokal, yang sangat penting dalam mengembangkan daerah (Prasetyaningsih dan Widjonarko, 2015: 516).

Kekuatan ekonomi lokal adalah kemampuan suatu daerah untuk menumbuhkan perekonomiannya dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi dan kualitas hidup di masa depan. Bersama-sama, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat mempermudah pertumbuhan ekonomi dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor bisnis memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek pengembangan ekonomi lokal untuk

menghasilkan inovasi lokal yang akan meningkatkan ekonomi lokal. Inisiatif-inisiatif ini memprioritaskan peningkatan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Strategi pengembangan ekonomi lokal akan efektif jika pemerintah daerah terus meningkatkan iklim investasi dan bisnis, sehingga tercipta lingkungan yang mendorong inovasi dan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan (World Bank, 2011).

Berdasarkan sudut pandang masyarakat, mencoba meningkatkan ekonomi lokal sama halnya dengan mencoba membebaskan masyarakat dari segala pembatasan yang membuat bisnis mereka tidak dapat berkembang lebih baik. Kesejahteraan semacam ini dapat dilihat sebagai cara untuk melindungi tradisi dan agamanya, serta teman-temannya dan rasa harga dirinya. Hal ini disebabkan Anda tidak bisa mendapatkan semua jaminan ini dari mana pun kecuali dari sistem komunitas, Anda harus mengandalkan sistem komunitas itu sendiri, yang juga disebut kemandirian. Oleh karena itu, meningkatkan ekonomi lokal memerlukan upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, termasuk kekuatan lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kapasitas kelembagaan, dan aset pengalaman (Haeruman, 2001).

b. Pendekatan Penguatan Ekonomi Lokal

Munir (2004) menulis dalam bukunya, yang juga berkaitan dengan pemikiran Bank Dunia, tentang strategi untuk meningkatkan ekonomi lokal:

1) Pengembangan Daya Saing

Kapasitas suatu negara untuk menghasilkan pertumbuhan PDB per kapita yang cepat dan berkelanjutan disebut sebagai daya saing (Laporan Daya Saing Forum Ekonomi Dunia, 1996). Dengan kata lain, daya saing merupakan pendekatan mendasar untuk meningkatkan standar hidup dengan memberikan kesempatan kerja bagi para pengangguran untuk mengurangi kemiskinan. Daya saing berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

Faktor-faktor komoditas yang tercipta memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing suatu daerah. Mengingat bahwa komoditas merupakan penentu daya saing, maka memilih komoditas yang tepat untuk dianalisis sangatlah penting. Dengan kata lain, seberapa baik komoditas tersebut membuat perekonomian suatu daerah tetap bertahan.

2) Pengembangan Klaster

"Mesin" ekonomi lokal sering disebut sebagai klaster industri. Sebuah klaster memiliki karakteristik yang berkaitan dengan produsen input, penyedia, dan perantara yang mengeksport barang dan jasa mereka (ide, inovasi, modal, dan infrastruktur). Dengan berfokus pada dukungan industri terkait yang memiliki kemampuan untuk mengeksport ke luar daerah, klaster industri ini diproyeksikan untuk mendorong pertumbuhan sistem industri lokal. Hubungan antara

beberapa industri dan peningkatan pendapatan daerah dapat memacu permintaan akan jasa dan barang lokal yang lebih luas (efek pengganda).

Pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien berkat pendekatan pengembangan kawasan berbasis kluster industri. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi secara langsung dengan dunia usaha untuk mengembangkan rencana pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dengan menggunakan strategi kluster industri. Agar pemerintah daerah dapat memberikan layanan untuk seluruh kluster dengan dampak yang sebesar mungkin, rencana ini menyediakan struktur (Bappenas, 2004).

3) Pengembangan Kelembagaan

Salah satu komponen yang harus ada dalam kegiatan pengembangan ekonomi lokal adalah keberadaan institusi formal dan informal. Ketika metode pasar tidak lagi mampu menjawab permasalahan ekonomi, maka lembaga ini nantinya akan muncul sebagai media yang dipilih. Lembaga formal dan informal dapat mengubah transaksi komersial menjadi hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya dan adat istiadat sosial yang diterima (Arsyad, 2011).

Faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah aksesibilitas organisasi sosial seperti LSM. LSM dapat digunakan sebagai alat untuk mendidik dan memberdayakan masyarakat dalam isu-isu yang mendukung kegiatan pembangunan ekonomi lokal, selain sebagai organisasi untuk mengontrol kinerja pembangunan. Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), merupakan salah satu tanda lembaga yang baik. Ketika memutuskan program dan prosedur pengambilan keputusan untuk inisiatif pengembangan ekonomi lokal, lembaga ini dapat menyuarakan kepentingan dan tujuan masyarakat.

4) Pengembang Sumberdaya Manusia

Penguasaan teknologi yang baik akan mempengaruhi kualitas dan cakupan pembangunan itu sendiri, seiring dengan perkembangan era informasi dan teknologi yang semakin pesat. Basis sumber daya manusia yang berkaliber tinggi diperlukan untuk kurasi teknologi. Penguasaan teknologi yang kuat dalam konteks produksi akan mendorong inovasi teknologi. Kemajuan teknis ini pada akhirnya dapat mengarah pada penemuan produk baru dan pengembangan teknik produksi yang lebih produktif yang akan merampingkan proses produksi (Baron dalam Arsyad, 2011).

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lokal, sumber daya manusia yang unggul sangat penting dalam pelaksanaannya. Selain berperan sebagai tenaga produksi, sumber daya manusia yang ada juga harus mampu menggunakan teknologi yang ada saat ini untuk menghasilkan barang yang bernilai tinggi. Kualitas sumber daya manusia lokal memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pertumbuhan ekonomi lokal.

5) Penguasaan Teknologi

Kemajuan teknologi dipandang oleh sebagian besar ekonom sebagai sumber yang paling signifikan dan kriteria keberhasilan dalam

proses pembangunan dan ekspansi ekonomi. Penguasaan teknologi adalah proses di mana komponen-komponen produksi disatukan untuk mencapai tujuan produksi. Diharapkan bahwa suatu produk dapat ditingkatkan untuk memberikan lebih banyak umpan balik dengan menggunakan kemampuan teknologi yang semakin maju.

Negara-negara kaya saat ini lebih banyak menggunakan teknologi bersifat padat modal dan mahal. Akan tetapi, negara-negara berkembang biasanya membutuhkan surplus tenaga kerja, terutama di antara mereka yang kurang berpendidikan. Pada dasarnya, negara-negara berkembang membutuhkan jenis teknologi yang berbeda dengan negara-negara maju. Akan ada banyak masalah jika negara-negara berkembang meniru dan mengalihkan teknologi yang digunakan di negara-negara kaya, terutama karena teknologi tersebut tidak memadai dan bahkan seringkali tidak sesuai.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Konsep BUMDes

Menurut Maryunani (2008), BUMDes adalah organisasi bisnis desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memajukan perekonomian desa dan mengembangkan hubungan sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. BUMDes adalah sebuah bisnis, oleh karena itu harus menghasilkan uang.

Selain itu, Maryunani (2008) menguraikan fitur-fitur berikut sebagai perbedaan utama antara BUMDes dan lembaga ekonomi komersial:

- 1) Modal desa (51%) dan modal masyarakat (49%) yang diperoleh melalui penyertaan modal (saham atau lembar saham);
- 2) Perusahaan ini dikelola dan dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat;
- 3) Dijalankan sesuai dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berpijak pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan lestari di lingkungan sekitar (kearifan lokal);
- 4) Bidang usaha didasarkan pada pertumbuhan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang mendukung eksistensi ekonomi masyarakat.
- 5) Tenaga kerja yang potensial di desa adalah tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes.
- 6) Uang yang dihasilkan digunakan untuk meningkatkan partisipasi modal atau kesejahteraan daerah pedesaan.
- 7) Diskusi desa digunakan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.
- 8) Ada kebijakan desa untuk mengimplementasikan peraturan BUMDes.
- 9) BUMDes difasilitasi oleh pemerintah, provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa;
- 10) Operasional BUMDes dilaksanakan di bawah pengawasan bersama (Pemerintah Desa, BPD, anggota).

Namun, Purnomo (2004) menyatakan bahwa berikut ini adalah alasan untuk mendirikan badan usaha milik desa:

- 1) Meningkatkan ekonomi lokal.
- 2) Meningkatkan sumber pendapatan utama desa.
- 3) Memberikan manfaat yang luas dalam bentuk pelayanan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat.
- 4) Sebagai perintis usaha komersial di masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa tujuan pendirian badan usaha milik desa:

- 1) Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa;
- 2) Memperluas peran masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- 3) Memperluas kapasitas sektor informal dalam mempekerjakan penduduk desa;
- 4) Meningkatkan daya cipta kewirausahaan masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Selain itu, BUMDes akan memainkan peran strategis yang sangat penting dalam mendorong perekonomian desa sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan di atas. Seyadi (2010), membahas pentingnya BUMDes untuk meningkatkan ekonomi lokal diantaranya:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa dengan membangun dan mengembangkan potensi dan keterampilan mereka.
- 2) Berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dan lingkungan.
- 3) Meningkatkan perekonomian rakyat, dengan BUMDes sebagai sokogurunya, dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional.
- 4) Berupaya mewujudkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan.
- 5) membantu masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak uang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

PP Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUMDes bertujuan:

- 1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa.
- 2) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.

- 3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa (PAD) serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi desa.
- 4) Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa.
- 5) Mengembangkan ekosistem digital desa.

BUMDes diharapkan dapat membentuk unit-unit usaha dalam memanfaatkan potensi ekonomi desa dan tidak hanya terfokus pada keuntungan finansial dari kegiatannya, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Secara spesifik, BUMDes tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab X pasal 87 ayat 1 diatur bahwa BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta BUMDes juga diharapkan dapat melakukan tugas-tugas berikut ini sesuai dengan potensi sumber daya manusia yang ada seperti yang tercantum dalam penjelasan UU Desa Pasal (1):

- 1) Lembaga yang membantu daerah pedesaan untuk mengembangkan ekonomi mereka dan/atau mendapatkan layanan yang mereka butuhkan dari pemerintah.

- 2) Lembaga-lembaga sosial harus mendukung kepentingan masyarakat dengan membantu menyediakan layanan sosial.
- 3) Bisnis yang memberikan lebih banyak ruang kepada daerah pedesaan untuk membantu mereka menghasilkan lebih banyak uang, atau dengan kata lain, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
- 4) Lembaga yang dapat menemukan dan menggunakan potensi ekonomi dan bisnis di desa untuk menghasilkan lebih banyak uang bagi desa pada awalnya.
- 5) Lembaga yang dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan lain di daerah tersebut.

Dalam pembukaan Undang-undang Desa Pasal 1 Angka (6), BUMDes dapat diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa yang bertujuan membahas pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 132 Peraturan Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa BUMDesa didirikan

berdasarkan musyawarah desa, dan hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam peraturan desa. Organisasi pemerintah yang terdiri dari penasihat dan orang-orang yang menjalankan operasional berbeda dengan organisasi yang mengelola bumdesa. Kepala desa memilih dan memberhentikan pelaksana operasional, sementara kepala desa secara ex-officio menjadi penasihat.

Tradisi pedesaan, salah satu konsep inti, dikonseptualisasikan bersamaan dengan pendirian BUMDesa. Tradisi mempengaruhi umur panjang dan keberlanjutan BUMDesa dengan cara yang mirip dengan kekayaan modal sosial dan politik. Menurut Anom (2015:11-12), konsep utama dari Tradisi Perdesaan dalam pendirian BUMDesa adalah:

- 1) Untuk tumbuh secara lebih luas dan inklusif, BUMDesa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya).
- 2) Sebagai platform tertinggi bagi pertumbuhan usaha ekonomi desa yang dipimpin oleh BUMDesa, BUMDesa tumbuh dalam politik inklusif melalui praktik musyawarah desa.
- 3) BUMDesa adalah usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif yang menggabungkan karakteristik usaha sosial dan usaha ekonomi.
- 4) BUMDesa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa.

- 5) BUMDesa menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
- 6) BUMDesa melakukan transformasi terhadap program yang di inisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik desa”.

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

BUMDes akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai penggerak usaha pedesaan. Pemerintah membuat rencana BUMDes untuk meningkatkan taraf hidup di daerah pedesaan. BUMDes diharapkan dapat dikelola secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama sebagai perusahaan komersial pedesaan. Media outlet BUMDes berfungsi sebagai sumber inspirasi utama masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan potensi desa.

BUMDes menjadi proyek rujukan dengan menawarkan kepada warganya sarana untuk menginvestigasi dan mengeksploitasi potensi desa menjadi produk berkualitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes memiliki banyak fungsi: (1) menentukan potensi lokal desa; (2) memetakan potensi ekonomi unggulan; (3) membangun pusat ekonomi yang integratif; dan (4) mempromosikan produk unggulan desa. Keempat tanggung jawab BUMDes tersebut menjadi landasan bagi desa yang mandiri dan berkembang.

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan Undang-undang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang dikelola secara baik dan profesional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa.

Pendampingan masyarakat desa sangat penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendampingan berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada Pasal 28 Ayat (1). Pendampingan berjenjang adalah pendampingan yang diberikan secara konsisten sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun bantuan untuk pemberdayaan masyarakat diberikan secara bertahap, kemandirian masyarakat tetap diperhatikan. Masyarakat yang mandiri memainkan peran penting dalam

memastikan bahwa desa dapat tumbuh secara berkelanjutan. Potensi dan sumber daya berkualitas yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat dapat digunakan sebagai landasan utama pertumbuhan desa dalam jangka panjang.

Secara teori, pembentukan BUMDes merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan desa sebagai bagian dari gerakan usaha ekonomi desa. Oleh karena itu, rencana pengembangan ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencakup hal-hal berikut:

- 1) Meningkatkan ekonomi lokal.
- 2) Meningkatkan sumber pendapatan utama desa.
- 3) Memberikan manfaat yang luas dalam bentuk pelayanan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat.
- 4) sebagai pencetak usaha bisnis masyarakat.

Rencana aksi tersebut di atas dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan ekonomi pedesaan, terutama dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat pedesaan setiap hari. Semua aspek dari masyarakat dan pemerintah desa harus terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi pedesaan. Gagasan pembangunan ekonomi pedesaan perlu ditingkatkan, termasuk penggunaan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi desa, pertanian berkelanjutan, dan faktor-faktor lainnya. Namun, strategi untuk mengatasi masalah ekonomi pedesaan saja tidak cukup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena. Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahuinya. Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam.

Tiga (3) pertimbangan berikut ini mendasari penggunaan metode kualitatif di tingkat konseptual: Pertama, dalam hal beradaptasi dengan berbagai realitas yang mungkin dihadapi di lapangan selama penelitian, metode kualitatif lebih fleksibel. Kedua, metode ini secara eksplisit menyatakan sifat hubungan peneliti dengan responden (informan). Ketiga, metode kualitatif ini peka terhadap kemungkinan-kemungkinan penajaman yang dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, seperti pola-pola dan nilai-nilai yang ditemukan di lapangan, dan bersifat fleksibel (Moleong, 1996:5).

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah desa Srimartani dan BUMDesa Srimartani. Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam pengertian bahasa adalah orang yang melakukan sesuatu (Hamidi, 2010:74). Rumusan lain menyatakan sebagai sumber data, darimana suatu data penelitian diperoleh (Arikunto, 2010:172). Subjek penelitian tersebut mencakup semua pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian (Maryadi, 2010:13). Jadi subjek penelitian merupakan sumber data darimana suatu data diperoleh, mencakup semua pihak yang memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pemerintah Desa Srimartani, Pengurus BUMDes, dan Masyarakat Desa Srimartani. Strategi purposive digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai Penguatan Ekonomi Lokal melalui BUMDesa di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, termasuk pengambilan sampel sumber data berdasarkan informan yang relevan dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Terdapat 6 (enam) orang yang menjadi informan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Lurah/Kades : 1 Orang
- 2) Perangkat Desa : 2 Orang
- 3) Pengurus BUMDes : 1 Orang
- 4) Kepala Dukuh : 1 Orang
- 5) Masyarakat : 1 Orang

b. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan peristiwa, tingkah laku, aktivitas, atau gejala-gejala sosial lainnya yang diteliti (Maryadi, 2010: 13). Objek penelitian juga memiliki arti yaitu objek yang diobservasi dalam suatu penelitian kualitatif lazimnya suatu situasi sosial tertentu (Faisal, 1990:77). Jadi objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran penelitian atau sesuatu yang menjadi kajian atau yang diteliti oleh peneliti. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan BUMDes Srimartani Makmur sebagai lembaga penguatan ekonomi lokal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data adalah langkah untuk memenuhi standar data yang diketahui dan digunakan. Berikut adalah langkah-langkah dalam metode pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi merupakan cara yang baik untuk mendapatkan informasi, yang berarti bahwa peneliti perlu memperhatikan dengan seksama subjek penelitiannya (Riduwan, 2004: 104). Orang biasanya menganggap metode observasi sebagai suatu kegiatan pencatatan secara teliti dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada subjek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subjek yang secara aktif mereaksi terhadap objek.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan wawancara yang bersifat terbuka, tidak terstruktur, elok dan tidak baku. Wawancara mendalam merupakan pertemuan berulang kali secara langsung antara peneliti dan subyek penelitian. Menurut Taylor dan Bogdan (dalam Moleong, 1996), wawancara mendalam adalah tatap muka berulang antara peneliti dan subyek penelitian, untuk memahami pendapat subjek penelitian seperti yang diungkapkan dalam bahasa aslinya tentang kehidupan, pengalaman, atau keadaan sosialnya. Wawancara mendalam adalah percakapan dua arah dalam suasana kesetaraan, akrab dan informal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil data-data yang sudah ada setiap arsip. Mencari informasi skunder mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sumber-sumber lainnya merupakan strategi dokumentasi (Arikunto, 2010:139).

d. Triangulasi Data

Metode pengumpulan data yang dikenal dengan triangulasi ini bersifat menggabungkan dari berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi data, menurut Sugiyono (2016:127) adalah metode penentuan kebenaran data dengan cara membandingkan data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber. Peneliti menarik suatu kesimpulan dari data yang telah ditelitinya, dan

ketika sumber data telah dihubungi, maka dimintakan kesepakatan (member check).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sekelompok prosedur untuk menemukan dan menyusun data yang diperoleh secara metodis untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman digunakan dalam penelitian ini sebagai metodologi analisis data. Reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah tiga komponen dasar dari teknik ini, dan semuanya dilakukan sekaligus ketika data dikumpulkan dengan cara yang mirip sirkus selama proses penelitian. Berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing tiga elemen dari model analisis interaktif Miles dan Huberman:

a. Reduksi Data (pengumpulan data)

Reduksi data adalah proses pemilihan dan perampangan data lapangan. Sehingga sebagai sumber penelitian, hanya informasi yang diperlukan dan dianggap dapat dipercaya saja yang digunakan. Dari tahap pertama hingga tahap terakhir, tahap ini berlangsung secara terus menerus.

b. Data Display (Penyajian Data)

Sekumpulan fakta diorganisasikan dalam suatu sajian data untuk memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Data diurutkan dan ditempatkan dalam suatu pola hubungan melalui penyajian, sehingga lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2016: 137).

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti harus sudah mulai memahami apa saja hak-hak yang ditemui segera setelah data dikumpulkan. Hasil akhirnya memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data lapangan (Sutopo, 2006: 141).

BAB II

PROFIL KALURAHAN SRIMARTANI

A. Sejarah Kalurahan Srimartani

Kalurahan Srimartani merupakan penggabungan dari tiga kalurahan, yaitu Kalurahan Gendongan, Kalurahan Daraman, dan Kalurahan Petir. Hal ini didasarkan pada kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang diumumkan pada tahun 1946 ketika Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk. Pada saat itu, banyak desa yang dianggap kecil, sehingga masuk akal untuk menggabungkannya agar menjadi satu desa besar. Tujuan lain dari kebijakan penggabungan ini adalah untuk melindungi kemandirian pemerintah desa tanpa merugikan kas desa atau efisiensi anggaran.

Proses penyatuan beberapa kalurahan memakan waktu sekitar dua tahun, dari tahun 1946 hingga 1948. Pada tanggal 19 April 1948, proses penggabungan selesai. Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang perubahan Daerah Kalurahan. Sedangkan proses penggabungan tersebut dinamakan Blengketan.

B. Letak Geografis dan Administratif Kalurahan Srimartani

1. Batas Wilayah

Kalurahan Srimartani terletak dibagian timur Kecamatan Piyungan, sehingga sebagian wilayah Kalurahan Srimartani yaitu bagian timur merupakan dataran tinggi karena berbatasan langsung dengan pegunungan Gunung Kidul, sedangkan bagian baratnya merupakan dataran rendah. Kondisi geografis berupa dataran tinggi di sebagian wilayah kalurahan

srimartani menyebabkan Kalurahan Srimartani rawan terhadap bencana longsor. Kalurahan Srimartani berbatasan langsung dengan empat Desa yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Sumberharjo, Prambanan, Sleman
- b. Sebelah Selatan : Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul
- c. Sebelah Barat : Desa Jogotirto, Berbah, Sleman
- d. Sebelah Timur : Desa Ngoro-oro, Patuk, Gunung Kidul

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa Kalurahan Srimartani merupakan kalurahan yang berada di tengah-tengah keempat desa di kanan kirinya. Oleh karena itu, Kalurahan Srimartani merupakan tempat bertemunya keempat desa tersebut.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Srimartani 8.577.375,00 Ha, luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Luas wilayah yang diperuntukan.

No	Jenis Peruntukan	Luas/Ha
1	Lahan persawahan	401.4995
2	Lahan pemukiman	250.5990
3	Lahan hutan atau tegalan	131.7670
4	Lahan perkebunan	73.8720

Sumber data: Buku Monografi Desa Srimartani, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa luas wilayah Desa Srimartani 8.577.375 Ha, yang difungsikan menjadi lahan persawahan seluas 401.4995 Ha (46,8 %), untuk lahan pemukiman seluas 250.5990 Ha

(29,2163 %), lahan hutan atau tegalan seluas 131.7670 (15,36 %), dan untuk lahan perkebunan seluas 73.8720 Ha (8,6125 %).

Sebagian besar wilayah Kalurahan Srimartani terdiri dari persawahan. Hal ini merupakan potensi yang harus dijaga dan dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk menjaga potensi tersebut.

3. Keadaan Topografi

Sebagian besar wilayah Kalurahan Srimartani merupakan dataran rendah. Kalurahan Srimartani juga merupakan tempat di mana tanaman ditanam dan hewan-hewan dirawat. Desa ini juga merupakan desa yang telah menjadi kawasan wisata pedesaan. Kalurahan Srimartani memiliki iklim dan wilayah administratif sebagai berikut:

a. Iklim

Kalurahan Srimartani, seperti halnya daerah lain di Indonesia, mengalami musim panas dan kemarau, serta musim dingin dan hujan.

b. Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi Pemerintah Kalurahan Srimartani meliputi 17 Padukuhan dan 112 Rukun Tetangga (RT). Dan berikut rinciannya:

Tabel 2. 2

Jumlah Padukuhan, Rukun Tetangga (RT), dan Luas Wilayahnya

No	Nama Wilayah	Jumlah RT	Luas (Ha)	%
1	Bulusari	6	58,7720	7,23
2	Daraman	7	32,9240	4,05
3	Kembangsari	10	48,0100	5,90
4	Kemloko	4	29,1552	3,59
5	Kwasen	5	60,3900	7,43
6	Mandungan	10	56,4650	6,94
7	Mojosari	5	57,4750	7,07
8	Munggur	6	35,9070	4,42
9	Mutihan	5	31,5735	3,88
10	Petir	9	29,4575	3,62
11	Piyungan	10	31,9735	3,93
12	Pos Piyungan	6	84,2190	10,36
13	Rejosari	7	72,0850	8,86
14	Sanansari	7	37,0900	4,56
15	Umbulsari	4	79,34909	4,76
16	Wanujoyo Kidul	5	27,2530	3,35
17	Wanujoyo Lor	6	31,4100	3,86
Jumlah	17	112	813,1960	100

Sumber data: Buku Monografi Desa Srimartani, 2022

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Srimartani membawahi wilayah yang terdiri dari 17 Padukuhan dan 112 Rukun Tetangga (RT). Terdapat variasi yang luas dalam distribusi RT di seluruh padukuhan, dengan beberapa padukuhan memiliki jumlah RT yang sama dengan padukuhan lainnya dan beberapa padukuhan lainnya memiliki jumlah RT yang sangat berbeda. Hampir tidak ada RT yang sama di sebagian besar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah padukuhan tidak berpengaruh terhadap jumlah RT. Jumlah RT tidak tergantung pada luas wilayah padukuhan dan sebaliknya.

C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi kependudukan Desa Srimartani mempunyai penduduk:

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	%
1	Laki-laki	8.319	48
2	Perempuan	8.633	52
	Jumlah	16.952	100

Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2022

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk Kalurahan Srimartani adalah 16.952 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki adalah 8.319 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki yaitu 8.633 jiwa. Adapun jumlah KK di Kalurahan Srimartani adalah sebanyak 4.488 KK.

2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Sekitar 15% atau 1.510 keluarga dari total 4.488 keluarga di Kelurahan Srimartani hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, 2.979 keluarga dapat dikatakan memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kalurahan Srimartani memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor pendukung kemajuan sumber daya manusia suatu daerah. Berikut dijelaskan tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Srimartani:

Tabel 2. 4
Tingkat Pendidikan Kalurahan Srimartani

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	3160	3879	7039
2	SMP	635	801	1436
3	SLTA/SMA	633	519	1152
4	D3	62	91	153
5	Sarjana	326	308	634
	Jumlah	10.414		

Sumber data: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2022

Menurut data yang disajikan di atas, terdapat 10.414 orang yang tinggal di Kalurahan Srimartani yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Kalurahan Srimartani memiliki 6.538 orang yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Kalurahan Srimartani masih tergolong cukup baik, hal bisa dilihat dimana jumlah orang yang berpendidikan masih cukup tinggi dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Untuk menginspirasi generasi masa depan agar tertarik secara aktif dalam pendidikan mereka, pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Karena untuk mempertahankan masyarakat yang fungsional membutuhkan penduduk yang berpendidikan. Sementara itu, pemerintah Kalurahan Srimartani sedang mengerjakan inisiatif terpisah untuk memberdayakan masyarakat secara luas, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat pendidikan mereka yang saat ini masih buta huruf.

4. Pekerjaan

Tabel 2. 5
Pekerjaan Masyarakat Kalurahan Srimartani

No	Pekerjaan	Jiwa	Persentase
1	Petani	9.724	62
2	Buruh Tani	538	10
3	Peternak	185	2
4	PNS/TNI/POLRI	1.275	20
5	Swasta	293	4
6	Pensiunan	344	4
7	Pedagang	92	4
8	Tukang Bangunan	424	10
9	Jasa	91	1
	Jumlah	12.968	100

Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2022

Mayoritas penduduk Kalurahan Srimartani bekerja di sektor pertanian, seperti yang terlihat pada Tabel 2.5 di atas. Luasnya lahan persawahan di Kalurahan Srimartani merupakan cerminan dari jumlah tenaga kerja pertanian yang sangat besar di kota ini. Melihat potensi yang ada di wilayah ini, pemerintah Kalurahan Srimartani seharusnya memberikan lebih banyak suara kepada masyarakat dalam pengelolaan pertanian agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan menghasilkan lebih banyak uang di masyarakat.

5. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Potensi sumber daya alam (SDA) yang tinggi dan sebarannya yang luas di Kalurahan Srimartani. Terdapat 1.317.670 hektar area hutan atau tegalan. Selain itu, Kalurahan Srimartani juga memiliki lahan perkebunan seluas 738.720 hektar (ha) dan lahan persawahan seluas 4.014.995 ha. Pendapatan dari pengelolaan lahan di Kalurahan Srimartani adalah sebagai berikut:

- a. Padi : 12 ton/Th/Ha
- b. Ketela : 9.6 ton/Th/Ha
- c. Jagung : 5.4 ton/Th/Ha
- d. Kacang Tanah : 2.3 ton/Th/Ha
- e. Kedelai : 1.2 ton/Th/Ha

Semua kemungkinan ini ada, dan jika ditangani dengan baik, mereka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah kota, dunia usaha, dan masyarakat umum. Untuk memperkuat potensi lokal dan juga untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa, pemerintah sebagai fasilitator harus mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mampu mengelola semua potensi yang sudah ada.

6. Potensi Lainnya yang Ada di Kalurahan Srimartani

Selain memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup memadai seperti pertanian, perkebunan, maupun peternakan di Kalurahan Srimartani juga terdapat potensi lain yaitu potensi rumah industri, diantaranya:

- a. Home Industri Tempe : 10 Unit
- b. Home Industri Tahu : 5 Unit
- c. Home Industri Criping : 5 Unit
- d. Home Industri Peyek : 5 Unit
- e. Home Industri Ikan Tawar : 6 Unit

Sektor perumahan di Kalurahan Srimartani memberikan peluang untuk memperluas tenaga kerja lokal dan meningkatkan PDB kota. Namun, keberlangsungan sektor rumah tangga membutuhkan pengelolaan yang cermat. Selain itu, potensi industri rumah tangga hanya dapat dikembangkan dengan bantuan pemerintah desa dan kerja sama dari berbagai pihak.

D. Kondisi Sarana dan Prasarana

Memiliki sarana dan prasarana yang sudah tersedia merupakan keuntungan bagi usaha masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu wilayah untuk memiliki infrastruktur yang memadai. Kondisi infrastruktur dan fasilitas di Kelurahan Srimartani saat ini adalah sebagai berikut:

1. Balai Desa : 1 Unit
2. Gedung Serba Guna : 1 Unit
3. Sekolah
 - a. PAUD : 10 Unit
 - b. TK : 13 Unit
 - c. SD : 8 Unit
 - d. SMP : 6 Unit
 - e. SMA : 7 Unit
4. Puskesmas Pembantu : 1 Unit
5. KORAMIL : 1 Unit
6. KUA : 1 Unit
7. BPP : 1 Unit
8. Insiminator Sapi : 1 Unit

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 9. Kantor Pengairan | : 1 Unit |
| 10. PDAM | : 1 Unit |
| 11. Balai Benih Pembantu | : 1 Unit |
| 12. SPBU | : 1 Unit |
| 13. Jalan Desa | : belum terdata |
| 14. Jalan Kabupaten | : 5 Km |
| 15. Jembatan | : 7 Unit |
| 16. Saluran Irigasi | : 28 Unit |
| 17. Dam | |
| a. Bendungan | : 1 Unit |
| b. Parit | : 1 Unit |
| c. Pengendali Lereng | : 2 Unit |
| 18. Lapangan Olahraga | : 1 Unit |
| 19. Masjid | : 32 Unit |
| 20. Mushola | : 61 Unit |
| 21. Madrasah Diniyah | : 9 Unit |
| 22. TPA | : 22 Unit |
| 23. Kantor Lembaga Agama | : 1 Unit |
| 24. Pasar | : 1 Unit |

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Kalurahan Srimartani memiliki infrastruktur dan layanan yang berkembang dengan baik. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam memelihara sumber daya tersebut.

E. Pemerintahan Kalurahan

1. Pemerintahan Kalurahan Srimartani

Tabel 2. 6

Pemerintahan Kalurahan Srimartani Periode 2018-2024

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	H. Mulyana	Lurah/Kepala Desa	D3
2	Eko Herri Purwanto	Sekretaris	S1
3	Gunanjar	Ka. Sie Pemerintahan	SLTA
4	Suratman	Ka. Sie Kesejahteraan	SLTA
5	Isbandiyo	Kaur Tata Usaha dan Umum	SLTA
6	Tugito	Kaur Keuangan	SLTA
7	Jumadi	Ka. Sie Pelayanan	SLTA
8	Lilik Raharjo	Kaur Perencanaan	SLTA
9	Mujiyati	Dukuh Pos Piyungan	SMP
10	Yunianta	Dukuh Mandungan	SLTA
11	Awali	Dukuh Kwasen	SLTA
12	Panggih Raharjo	Dukuh Wanujoyo Kidul	SLTA
13	Syamsul Arifin	Dukuh Daraman	SLTA
14	Jumali	Dukuh Kemloko	SLTA
15	Koco Widagdo	Dukuh Mojosari	SLTA
16	Tony Subagyo	Dukuh Piyungan	S1
17	Zainal Arifin	Dukuh Wanujoyo Lor	SLTA
18	Ahmad Mujab Isnadi	Dukuh Kembangsari	SLTA
19	Sumadi	Dukuh Petir	SLTA
20	Syarief Nur Hidayat	Dukuh Munggur	SLTA
21	Suharno	Dukuh Mutihan	SLTA
22	Mugiman	Dukuh Sanansari	SLTA

Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2022

Berdasarkan informasi tentang struktur pemerintahan Kalurahan Srimartani yang disajikan pada tabel di atas untuk tahun 2018-2024, sebagian besar anggotanya (18 dari total 29 orang) telah menyelesaikan setidaknya satu tahun sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas, satu orang menyelesaikan setidaknya satu tahun sekolah menengah pertama

atau D3, dan dua orang menyelesaikan setidaknya satu tahun S1. Kalurahan Srimartani memiliki pemerintahan yang berkembang dengan baik karena sebagian besar disebabkan oleh tingkat melek huruf yang tinggi. Karena pada dasarnya, pendidikan yang lebih baik diperlukan agar desa dapat berkembang menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.

2. Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Srimartani

a. Visi

Visi Pemerintah Kalurahan Srimartani seperti yang tertuang dalam RPJMDes periode 2018-2024 adalah sebagai berikut: *“Terbentuknya Pemerintah Desa yang bersih dan berwibawa, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sehat, sejahtera lahir batin yang agamis dan dinamis”*.

b. Misi

Misi Pemerintah Kalurahan Srimartani seperti yang tertuang dalam RPJMDes periode 2018-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi secara rutin untuk mengoptimalkan kinerja pamong desa, lembaga desa dan elemen masyarakat untuk lebih memacu segala daya usaha dan upaya membangun desa dengan mengedepankan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
NYAWIJI KANGGO SRIMARTANI.
- 2) Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk pembangunan desa secara menyeluruh dengan berdasarkan undang-undang dan

ketentuan-ketentuan hukum negara, adat/masyarakat yang berlaku untuk melaksanakan pembangunan yang merata di berbagai bidang antara lain:

- a) Kesehatan
- b) Pendidikan
- c) Pemerintahan
- d) Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- e) Perbaikan Infrastruktur
- f) Seni dan Budaya
- g) Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

F. Keuangan Kalurahan Srimartani

1. Pendapatan Kalurahan Srimartani

Tabel 2. 7

Pendapatan Kalurahan Srimartani

Rincian	Rp
Pendapatan asli Kalurahan	175.209.250,00
Pendapatan Transfer	5.212.226.900,00
Pendapatan Lain-Lain	13.253.627,00
Total Pendapatan	5.400.689.777,00

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2022

Data pada tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa Kalurahan Srimartani memperoleh total pendapatan sebesar Rp 5.400.689.777,00 setiap tahunnya. Kalurahan Srimartani memiliki beberapa sumber pendapatan, tetapi pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan terbesar dari total pendapatannya.

2. Belanja Kegiatan Kalurahan

Tabel 2.8 berikut ini merinci rencana kegiatan Pemerintah Kelurahan Srimartani dan anggaran program terkait untuk tahun fiskal 2021.

Tabel 2. 8
Belanja Kegiatan Kalurahan

No	Item	Anggaran/Rp
1	Bidang penyelenggaraan Kalurahan	2.354.387.377,00
2	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan	1.866.959.188,00
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kalurahan	14.400.000,00
4	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Kearsipan	25.585.000,00
5	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	422.442.670,00
6	Sub. Bidang Pertanian	25.000.562,00
7	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.608.177.855,00
8	Sub. Bidang Pendidikan	37.480.000,00
9	Sub. Bidang Kesehatan	342.510.000,00
10	Sub. Bidang Pekerja Umum dan Penataan Ruang	1.230.385.855,00
11	Sub. Bidang Kawasan Pemukiman	959.500.000,00
12	Sub. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.350.000,00
13	Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.652.000,00
14	Sub. Bidang Pariwisata	15.300.000,00
15	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	276.989.800,00
16	Sub. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	164.497.400,00
17	Sub. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	65.580.000,00
18	Sub. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.841.600,00
19	Sub. Kelembagaan Masyarakat	29.070.800,00
20	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	159.990.000,00
21	Sub. Bidang Pertanian dan Peternakan	5.350.000,00
22	Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	105.050.000,00
23	Sub. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	39.040.000,00
24	Sub. Bidang Koperasi, UMKM	10.550.000,00
25	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	103.644.745,00
26	Sub. Bidang Penanggulangan Bencana	63.044.745,00
27	Sub. Bidang Darurat	5.000.000,00
28	Sub. Bidang Mendesak	35.600.000,00
29	JUMLAH BELANJA	5.503.189.777,00
30	SURPLUS/DEFISIT	102.500.000,00
31	PEMBIAYAAN	102.500.000,00
32	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2022

G. BUMDes Kalurahan Srimartani

1. Sejarah BUMDes Srimartani Makmur

Alamat BUMDes Srimartani Makmur adalah: Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul. BUMDes ini didirikan pada tanggal 28 November 2016 dan mengelola enam bisnis yang berbeda: pengelolaan pasar desa, penjualan ritel produk UMKM melalui gerai desa, layanan jasa (E-Warung, PPOB), pengelolaan sampah terpadu 3R, laboratorium petani hortikultura modern, dan pengelolaan air bersih. BUMDes Srimartani dikelola oleh tujuh orang: tiga orang manajer dan empat orang pekerja. Baik BUMDes Srimartani Makmur maupun visi dan misi yang jelas sangat penting bagi perusahaan yang sukses.

2. Visi dan Misi BUMDes Srimartani Makmur

a. Visi

Visi BUMDes Srimartani Makmur adalah menjadi pilar ekonomi menuju desa mandiri, makmur, dan sejahtera.

b. Misi

Misi BUMDes Srimartani adalah:

- 1) Menciptakan lapangan kerja
- 2) Memberikan pelayanan yang maksimal
- 3) Menggali dan mengembangkan potensi desa untuk didayagunakan
- 4) Membuka pola wirausaha masyarakat mandiri berkesinambung
- 5) Meningkatkan pendapatan asli desa

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan berkaitan dengan topik penelitian “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Penguatan Ekonomi Lokal di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul” sebagai berikut:

1. Kapasitas pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani secara umum sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah desa setempat untuk memberikan fasilitas seperti menganggarkan biaya untuk menyelenggarakan pelatihan bagi 17 kelompok tani di wilayah tersebut serta adanya kenaikan PAD. PAD yang didapat dari BUMDes mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 PAD yang dihasilkan dari pasar desa sebesar Rp. 27.500.000 dan ditahun 2022 naik menjadi Rp. 35.000.000 atau naik sebesar 27,27%. Pemerintah Kalurahan Srimartani juga tengah menyusun regulasi terkait peraturan kalurahan tentang tata ruang untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset desa seperti pengembangan wisata dan pertanian. Pemerintah Kalurahan Srimartani juga telah memetakan berbagai potensi desa yang dapat mendukung PAD setempat seperti pasar desa, *home industry*, pertanian, dan lain-lain. Pemerintah Kalurahan Srimartani juga menampung aspirasi para pelaku usaha dan memprioritaskan ide-ide yang dapat mendukung perekonomian

setempat misalnya menyelenggarakan pelatihan bagi kelompok wanita tani dan taruna tani. Pemerintah Kalurahan Srimartani juga melakukan kerjasama dengan pihak luar, misalnya saat ini BAZNAS memiliki kelompok binaan di wilayah ini. Kerjasama juga dilakukan dengan kampus-kampus di DIY, misalnya saat ini Kalurahan Srimartani membangun kemitraan dengan kampus UAD untuk pengembangan budi daya lele berserta olahan ikan lele.

2. Faktor pendukung pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di Kalurahan Srimartani adalah keinginan masyarakat, anggaran desa, serta dukungan dari lembaga-lembaga yang ada seperti BUMDes, kelompok tani, Gapoktani, KWT, dan lembaga usaha lainnya. Faktor yang menghambat pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini adalah kondisi ekonomi nasional yang kurang stabil pasca pandemi Covid-19. Guna mengatasi hambatan tersebut maka pemerintah setempat terus melakukan pendampingan pada para pelaku usaha misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Srimartani diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam penguatan ekonomi lokal. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan manajemen BUMDes di wilayah

tersebut agar kinerjanya terus meningkat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes, misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes serta pelatihan untuk menerapkan marketing digital dalam menjual produk lokal setempat. Pemerintah Kalurahan Srimartani diharapkan juga dapat terus mencari dan menjalin kemitraan dengan *stakeholder* lain dalam memajukan BUMDes, misalnya menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk membantu perekonomian lokal melalui program CSR-nya.

2. Pemerintah Kalurahan Srimartani diharapkan dapat konsisten dengan program kerja yang direalisasikan melalui dana BUMDES dengan cara tetap berpedoman pada payung hukum yang ada yakni UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa.
3. Pemerintah Kalurahan Srimartani khususnya aparat desa diharapkan dapat melibatkan semua unsur yang ada dalam pemerintahan desa, baik yang ada di struktur maupun diluar struktur agar supaya pengembangan kapasitas dalam penguatan ekonomi lokal dapat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2018. *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Expert.
- Anom, S.P. 2015. *Buku Saku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Arikunto, S. 2010. *Metode Penelitian Suatu Tindakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bappenas. 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Haeruman, H. 2001. *Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal: Bunga Rampai Indonesia*. Jakarta: Yayasan Mitra Pembangunan Desa Kota.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulis Proposal dan Laporan Penelitian*. Cetakan Pertama. Malang: UU pers.
- Irdam dan Saad, I. 2006. *Kajian Implementasi Trilogi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: STEKP.
- Maryadi. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong, L.J. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir, D. 2004. Analisis Transformasi Struktural dan Basis Ekonomi Daerah di Kabuapten Karanganyar. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan UNS*, Juli. Vol 1, No. 1, hal. 15-27.
- Nurcholis, H. 2011. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Prasetyaningsih, E.D.W. dan Widjonarko. 2015. Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Salak di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. *Teknik PWK*; Vol. 4; No. 4; 2015; hal. 514-529.

- Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa*. Makalah, BPMPD, Lombok Timur.
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Seyadi. 2010. *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Sutoro, E. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- World Bank. 2011. *Local Economic Development*. Washington D.C.: Urban Development Unit.

LAMPIRAN
PANDUAN WAWANCARA UNTUK LURAH/ KADES

A. Bentuk penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja program-program BUMDes yang ditujukan agar perekonomian lokal di desa ini memiliki daya saing yang tinggi?
2. Bagaimana perkembangan BUMDes di desa ini khususnya dalam mendukung perekonomian lokal?
3. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam membentuk unit-unit usaha lokal di wilayah ini untuk mengembangkan kawasan berbasis industri lokal?
4. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam membentuk kelembagaan formal maupun informal dalam mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
5. Apa saja syarat-syarat bagi warga yang ingin bergabung dengan BUMDes?
6. Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat yang bergabung di BUMDes?
7. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
8. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam mengembangkan penguasaan teknologi untuk mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?

B. Kapasitas pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja manfaat berdirinya BUMDes di desa ini?
2. Bagaimana efektivitas BUMDes dalam mendukung tercapainya penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
3. Apakah ada pendampingan dari BUMDes, untuk meningkatkan penjualan di BUMDes? Jika ada, apa saja program pendampingan yang telah dilakukan?
4. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam mengatur kegiatan ekonomi lokal di wilayah ini agar terus berkembang sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat?

5. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki desa meliputi aset fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
6. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam melakukan konsolidasi terhadap berbagai pihak baik BPD maupun lembaga desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
7. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
8. Bagaimana kapasitas BUMDes untuk merespon aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
9. Bagaimana kapasitas BUMDes untuk mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak luar dalam rangka mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?

C. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja faktor pendukung BUMDes dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
2. Apa saja faktor penghambat BUMDes dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
3. Apa saja upaya konkret yang telah dilakukan BUMDes untuk mengatasi hambatan tersebut?

PANDUAN WAWANCARA UNTUK PERANGKAT DESA

A. Bentuk penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja program-program BUMDes yang ditujukan agar perekonomian lokal di desa ini memiliki daya saing yang tinggi?
2. Bagaimana perkembangan BUMDes di desa ini khususnya dalam mendukung perekonomian lokal?
3. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam membentuk unit-unit usaha lokal di wilayah ini untuk mengembangkan kawasan berbasis industri lokal?
4. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam membentuk kelembagaan formal maupun informal dalam mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
5. Apa saja syarat-syarat bagi warga yang ingin bergabung dengan BUMDes?
6. Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat yang bergabung di BUMDes?
7. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
8. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam mengembangkan penguasaan teknologi untuk mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?

B. Kapasitas pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja manfaat berdirinya BUMDes di desa ini?
2. Bagaimana efektivitas BUMDes dalam mendukung tercapainya penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
3. Apakah ada pendampingan dari BUMDes, untuk meningkatkan penjualan di BUMDes? Jika ada, apa saja program pendampingan yang telah dilakukan?
4. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam mengatur kegiatan ekonomi lokal di wilayah ini agar terus berkembang sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat?

5. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki desa meliputi aset fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
6. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam melakukan konsolidasi terhadap berbagai pihak baik BPD maupun lembaga desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
7. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
8. Bagaimana kapasitas BUMDes untuk merespon aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
9. Bagaimana kapasitas BUMDes untuk mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak luar dalam rangka mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?

C. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja faktor pendukung BUMDes dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
2. Apa saja faktor penghambat BUMDes dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
3. Apa saja upaya konkret yang telah dilakukan BUMDes untuk mengatasi hambatan tersebut?

PANDUAN WAWANCARA UNTUK PENGURUS BUMDES

A. Bentuk penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja program-program BUMDes yang ditujukan agar perekonomian lokal di desa ini memiliki daya saing yang tinggi?
2. Bagaimana perkembangan BUMDes di desa ini khususnya dalam mendukung perekonomian lokal?
3. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam membentuk unit-unit usaha lokal di wilayah ini untuk mengembangkan kawasan berbasis industri lokal?
4. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam membentuk kelembagaan formal maupun informal dalam mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
5. Apa saja syarat-syarat bagi warga yang ingin bergabung dengan BUMDes?
6. Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat yang bergabung di BUMDes?
7. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
8. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam mengembangkan penguasaan teknologi untuk mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?

B. Kapasitas pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja manfaat berdirinya BUMDes di desa ini?
2. Bagaimana efektivitas BUMDes dalam mendukung tercapainya penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
3. Apakah ada pendampingan dari BUMDes, untuk meningkatkan penjualan di BUMDes? Jika ada, apa saja program pendampingan yang telah dilakukan?
4. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam mengatur kegiatan ekonomi lokal di wilayah ini agar terus berkembang sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat?

5. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki desa meliputi aset fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
6. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam melakukan konsolidasi terhadap berbagai pihak baik BPD maupun lembaga desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
7. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
8. Bagaimana kapasitas BUMDes untuk merespon aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
9. Bagaimana kapasitas BUMDes untuk mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak luar dalam rangka mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?

C. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja faktor pendukung BUMDes dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
2. Apa saja faktor penghambat BUMDes dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
3. Apa saja upaya konkret yang telah dilakukan BUMDes untuk mengatasi hambatan tersebut?

PANDUAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DUKUH

A. Bentuk penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja program-program BUMDes yang ditujukan agar perekonomian lokal di desa ini memiliki daya saing yang tinggi?
2. Bagaimana perkembangan BUMDes di desa ini khususnya dalam mendukung perekonomian lokal?
3. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam membentuk unit-unit usaha lokal di wilayah ini untuk mengembangkan kawasan berbasis industri lokal?
4. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam membentuk kelembagaan formal maupun informal dalam mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
5. Apa saja syarat-syarat bagi warga yang ingin bergabung dengan BUMDes?
6. Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat yang bergabung di BUMDes?
7. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
8. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam mengembangkan penguasaan teknologi untuk mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?

B. Kapasitas pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja manfaat berdirinya BUMDes di desa ini?
2. Bagaimana efektivitas BUMDes dalam mendukung tercapainya penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
3. Apakah ada pendampingan dari BUMDes, untuk meningkatkan penjualan di BUMDes? Jika ada, apa saja program pendampingan yang telah dilakukan?
4. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam mengatur kegiatan ekonomi lokal di wilayah ini agar terus berkembang sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat?

5. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki desa meliputi aset fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
6. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam melakukan konsolidasi terhadap berbagai pihak baik BPD maupun lembaga desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
7. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
8. Bagaimana kapasitas BUMDes untuk merespon aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
9. Bagaimana kapasitas pemerintah BUMDes untuk mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak luar dalam rangka mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?

C. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja faktor pendukung BUMDes dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
2. Apa saja faktor penghambat BUMDes dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
3. Apa saja upaya konkret yang telah dilakukan BUMDes untuk mengatasi hambatan tersebut?

PANDUAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

A. Bentuk penguatan ekonomi lokal

1. Bagaimana perkembangan BUMDes di desa ini khususnya dalam mendukung perekonomian lokal?
2. Apa saja program-program BUMDes yang ditujukan agar perekonomian lokal di desa ini memiliki daya saing yang tinggi?
3. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam membentuk unit-unit usaha lokal di wilayah ini untuk mengembangkan kawasan berbasis industri lokal?
4. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam membentuk kelembagaan formal maupun informal dalam mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
5. Apa saja syarat-syarat bagi warga yang ingin bergabung dengan BUMDes?
6. Bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat yang bergabung di BUMDes?
7. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
8. Apa saja upaya yang dilakukan BUMDes dalam mengembangkan penguasaan teknologi untuk mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?

B. Kapasitas pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja manfaat berdirinya BUMDes di desa ini?
2. Bagaimana efektivitas BUMDes dalam mendukung tercapainya penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
3. Apakah ada pendampingan dari BUMDes, untuk meningkatkan penjualan di BUMDes? Jika ada, apa saja program pendampingan yang telah dilakukan?
4. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam mengatur kegiatan ekonomi lokal di wilayah ini agar terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat?
5. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki desa seperti aset fisik, aset alam,

aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?

6. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik BPD maupun lembaga desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
7. Bagaimana kapasitas BUMDes dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
8. Bagaimana kapasitas BUMDes untuk merespon aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis untuk mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
9. Bagaimana kapasitas BUMDes untuk mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak luar dalam rangka mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?

C. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam penguatan ekonomi lokal

1. Apa saja faktor pendukung BUMDes dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
2. Apa saja faktor penghambat BUMDes dalam penguatan ekonomi lokal di wilayah ini?
3. Apa saja upaya konkret yang telah dilakukan BUMDes untuk mengatasi hambatan tersebut?

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN



Nama: H. Mulyana (Lurah/Kades)

Waktu wawancara: 15 Desember 2022



Nama: Lilik Raharjo (Kaur Perencanaan)

Waktu wawancara: 18 desember 2022



Nama: Eko Herri Purwanto, S.Psi (Carik Desa)

Waktu wawancara: 18 Desember 2022



Nama: Syarif Nur Hidayat (Ketua Dukuh Munggur)

Waktu wawancara: 24 Desember 2022



Nama: Suhardiyana (Ketua BUMDes)

Waktu wawancara: 22 Desember 2022



Nama: Ahmad Munawan (Masyarakat)

Waktu wawancara: 5 Januari 2023